

DINAMIKA

Neraca pembayaran surplus

PURWAKARTA: Bank Indonesia memprediksi neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus sekitar US\$5 miliar hingga US\$6 miliar pada tahun ini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan surplus NPI tersebut merupakan berkah dari aliran modal asing yang masuk ke Tanah Air.

Tahun lalu, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca pembayaran US\$30,3 miliar jauh lebih besar dari surplus tahun sebelumnya US\$12,5 miliar.

Sumbangan terbesar berasal dari transaksi modal dan keuangan yang mencapai US\$26,2 miliar terutama dalam bentuk penanaman modal asing langsung dan investasi portofolio. (BISNIS/MMH)

Menkeu bahas FTZ Batam

TANJUNGPINANG: Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan membahas masalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun dengan para pengusaha serta pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Riau Syed M. Taufik mengatakan pembahasan penyelesaian masalah kawasan perdagangan bebas itu diagendakan pada hari ini di Batam.

"Pertemuan, akan membahas penyempurnaan pelaksanaan FTZ pelabuhan bebas. Pemerintah mengupayakan agar FTZ semakin menarik bagi investor," kata Syed di Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

Dia mengatakan pemerintah berupaya memperkecil hambatan dalam melaksanakan FTZ. Kebijakan dan fasilitas FTZ diharapkan mampu meningkatkan investasi di Batam, Bintan dan Karimun. (ANTARA)

Tim tarif godok bea masuk obat

JAKARTA: Kementerian Keuangan akan menggodok permintaan koreksi terhadap pengenaan bea masuk bahan baku obat sebesar 5% dalam PMK No.241/2010.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan aspirasi tersebut akan dibawa ke tim tarif untuk kemudian diharmonisasikan kembali.

"Harmonisasi PMK No.241 sebetulnya hasil review dari seluruh kementerian dan melibatkan pasar. Kalau ada upaya untuk melakukan koreksi itu, kami sudah minta supaya berkomunikasi dengan masing-masing kementerian," ujarnya di Jakarta, pekan lalu. (BISNIS/14)

Dana prorakyat Rp108 triliun

JAKARTA: Pemerintah mengalokasikan Rp108 triliun untuk mendanai enam program prorakyat yang akan digulirkan pada tahun ini. Anggaran tersebut juga mencakup program perumahan murah yang akan dijalankan mulai semester II/2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan selain rumah murah, dana tersebut a.l. akan diarahkan ke listrik murah dan fasilitas untuk nelayan.

"Anggaran prorakyat kurang lebih Rp108 triliun diarahkan untuk [program penanggulangan kemiskinan] klaster IV," kata Agus di Jakarta, pekan lalu. (BISNIS/14/AGI)



BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

DEFLASI BAHAN MAKANAN: Seorang pegawai memilah daging di sebuah hipermarket di Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Berdasarkan data BPS, kelompok bahan makanan mencatatkan deflasi pada Februari yang merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Menghindari 'mainan' politik reshuffle (Sambungan dari Hal. 1)

Jadi, perombakan kabinet tidak akan banyak mengubah garis kebijakan. Ibarat makan di restoran, daftar menu sudah tersedia. Yang berubah adalah beberapa juru masaknya. Kepala juru masak tetap presiden yang sama. Semua menteri bertugas menjalankan PJP dan RPJM yang sama. Juga APBN 2011 yang sama. APBN tahun-tahun berikutnya pun merupakan penjabaran dari RPJM 2010-2014 yang sudah ada. Apa yang bisa membuat perombakan kabinet menghasilkan keadaan yang lebih baik? Kuncinya adalah bukan sekadar menggantikan posisi-posisi yang ditinggalkan oleh Golkar dan PKS, melainkan perombakan

sesuai dengan urgensinya. Selama pemerintahan SBY, sektor riil atau sektor produksi barang (pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan) terseok-seok.

Jika Menteri Pertanian di tangan Gerindra, mungkin kebijakan-kebijakan propertani akan lebih kental. Apalagi mengingat Prabowo Subianto adalah ketua umum HKTI. Mungkin hasilnya akan lebih baik.

Untuk posisi menteri perindustrian, yang sekarang dipegang oleh kader Golkar, harus dicari-cari sosok yang betul-betul paham industri. Jangan memaksa diserahkan kepada Gerindra atau PDI-P. Beban terberat Menteri

Perindustrian adalah mendorong agar sektor industri manufaktur tumbuh setidaknya sama dengan pertumbuhan PDB.

Sektor industri harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal dengan mendorong perkembangan industri hilir yang bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Harus diingat bahwa sektor ini adalah penyumbang terbesar di dalam PDB.

Sektor pertambangan masih cukup penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan energi nasional harus mampu menjadikan sektor ESDM lebih memakmurkan rakyat dan

menunjang industrialisasi. Sekalipun menteri ESDM adalah kader Partai Demokrat, Presiden agaknya perlu mencari figur baru untuk memimpin kementerian yang sangat strategis ini.

Dengan penyegaran di tiga posisi yang mengamankan sektor produksi barang, kita punya harapan bakal terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang lebih baik.

Posisi Kementerian BUMN sebaiknya tidak diserahkan kepada kader partai. Taruhannya amat berat. Sekarang saja Presiden sudah legowo menempatkan orang nonpartai. Adalah kemungkinan sangat berisiko kalau lantasi posisi ini jatuh ke partai.

Dengan tim yang baru, pemerintahan SBY bisa pindah 'gigi' ke yang lebih tinggi. Teramat banyak faktor penunjang yang telah hadir bersamaan.

Dengan Golkar di luar pemerintahan, fungsi checks and balances bisa lebih efektif. Mereka memiliki cukup banyak kader yang bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Selain itu, kompromi politik bisa dikurangi. Konflik kepentingan akan berkurang. Jika yang bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan jauh dari harapan kita, berarti masalahnya ada pada Presiden. Perombakan kabinet hanya jadi 'mainan' politik. Harga untuk perubahan menjadi sangat mahal.

PERTUKARAN DATA:

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan (tengah) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjawab pertanyaan wartawan seusul menandatangani nota kesepahaman bersama di Jakarta, Jumat. Kerja sama itu meliputi pertukaran data informasi statistik penanaman modal a.l. pembentukan modal tetap bruto dari statistik pendapatan daerah.



BISNIS/KELIK TARYONO

Pembiayaan APBN akan ditambah

Total defisit APBD dan APBN mencapai 2,1% PDB

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah mengungkapkan kemungkinan menambah pembiayaan dalam APBN sebagai solusi alternatif menutup pembengkakan defisit anggaran tahun ini.

Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan tambahan pembiayaan itu dilakukan setelah pemerintah mampu menghemat belanja negara yang termasuk kategori nonprioritas.

Bambang Permedi Sumantri Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan penghematan belanja negara dan mencegah tambahan pengeluaran adalah prioritas utama untuk membalik pembengkakan defisit anggaran tahun ini yang mencapai 0,2% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia melanjutkan tambahan pembiayaan menjadi opsi selanjutnya dengan tetap memperhatikan batas atas defisit tahun ini. "Pembiayaan adalah prioritas berikut dengan tetap menjaga

agar defisit tidak lewat 2% dari PDB," katanya kepada *Bisnis* di Jakarta, kemarin.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, defisit fiskal dipatok Rp124,7 triliun atau 1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, total defisit konsolidasi APBD diperkirakan 0,3% dari PDB, sehingga kumulatif defisit APBD dan APBN 2011 menjadi 2,1% PDB.

Kebijakan pengendalian defisit merupakan salah satu langkah pokok pemerintah pada tahun ini dalam rangka melanjutkan konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Target pembiayaan dalam APBN ditetapkan Rp124,66 triliun terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp125,27 triliun dan luar negeri neto minus Rp609,5 miliar.

Namun, kenaikan harga minyak dalam negeri (*Indonesia crude price/ICP*) menjadikan kondisi keuangan negara jadi bertolak belakang dengan potensi pelebaran defisit sekitar 2% dari PDB.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan APBN 2011 tertulis

Sensitivitas Defisit APBN 2011 terhadap perubahan asumsi makro			
Uraian	Deviasi	Asumsi	Potensi tambahan defisit
Pertumbuhan PDB (%)	-1	6,4	Rp4,4 triliun-Rp4,9 triliun
Inflasi (%)	+0,1	5,3	tidak langsung
Kurs (Rp/US\$)	+100	9.250	Rp380 miliar-Rp420 miliar
SBI 3 bulan (%)	+0,25	6,5	Rp300 miliar-Rp500 miliar
ICP (US\$/barel)	+1	80	Rp300 miliar-Rp0 miliar
Lifting minyak (bph)	-10.000	970.000	Rp3 triliun-Rp3,34 triliun
Konsumsi BBM (juta kilo liter)	+0,5	38,6	Rp1,14 triliun-Rp1,25 triliun

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2011

jika realisasi rata-rata ICP lebih tinggi US\$1 per barel dari asumsi US\$80 per barel, defisit seharusnya bisa berkurang berkisar Rp300 miliar.

Jika konsumsi BBM bersubsidi lebih tinggi 0,5 juta kilo liter dari kuota volume 38,6 juta kilo liter, defisit anggaran juga bisa melebar sekitar di kisaran Rp1,14 triliun-Rp1,25 triliun.

Subsidi bertambah

Harry Azhar Azis, Ketua Komisi XI DPR, memperkirakan jika ICP sekitar US\$100 per barel sepanjang 2011, beban subsidi bertambah sebesar Rp23,5 triliun. Untuk

menutup lubang anggaran tersebut, pemerintah menanggung penghematan anggaran belanja nonprioritas Rp16,5 triliun.

"Artinya akan ada selisih atau defisit sekitar Rp7 triliun atau 0,1% dari PDB," katanya. Apabila beban defisit membengkak, lanjut Harry, seharusnya tidak hanya belanjanya dipangkas, tetapi penerimaan perpajakan juga harus dijenjot.

Menurut dia, kenaikan pembiayaan merupakan cara singkat untuk menambal defisit, tanpa ada upaya untuk meningkatkan kinerja anggaran. Permasalahan utama saat ini, lanjut Harry, pembatasan

konsumsi BBM bersubsidi selalu tertunda dan hanya sebatas wacana.

Dia mengingatkan sekitar 80% BBM bersubsidi saat ini dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

"Wilayah BBM ini merupakan politik pemerintah. Penundaan [pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jabodetabek yang sedianya dijadwalkan pada April] menunjukkan pemerintah kalah mengikuti maunya pemerintah baru rente," tandasnya.

Selain dihadapkan dengan target nominal dalam APBN, pemerintah mesti memastikan laju perekonomian tetap tinggi dengan kualitas yang lebih baik. Kondisi itu diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di Tanah Air.

Beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan sejumlah indikator makroekonomi dan kesejahteraan menunjukkan perbaikan, tetapi masih banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. (*agust.supriadi@bisnis.co.id*)

SPT bisa jadi pembandingan pengusutan kasus korupsi

OLEH AHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak dinilai bisa dijadikan sebagai data pembandingan dalam pengusutan kasus korupsi.

Pengamat pajak dari Fisip UI Ruston Tambunan mengatakan SPT pajak bisa dimanfaatkan sebagai data pembandingan untuk kepentingan pembuktian dalam pengungkapan kasus korupsi.

Namun, dia mengingatkan data yang tercantum dalam SPT hanya bisa dibuka atas seizin menteri keuangan.

"Hakim bisa melakukan *cross check* data antara penghasilan dan harta yang dilaporkan di SPT dengan harta yang tersangkut atau yang diduga hasil korupsi," katanya kepada *Bisnis* di Jakarta, kemarin.

Dia memberi contoh wajib pajak dalam SPT hanya melaporkan penghasilan Rp120 juta setahun. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dalam setahun terdapat transfer ke rekening sampai sejumlah Rp10 miliar. Ruston mengatakan selisih pendap-

atan tersebut bisa dipertanyakan oleh hakim. "Demikian juga dengan laporan harta di SPT jika berbeda dengan data sebenarnya," katanya. Dia melanjutkan efektivitas pembuktian dengan menggunakan SPT sangat bergantung pada fakta-fakta yang dilaporkan dalam SPT.

Namun, Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Ditjen Pajak Liberty Padiangan menegaskan dari pengertian dan tujuannya SPT hanya merupakan sarana untuk penghitungan pajak dan bukan untuk kepentingan pembuktian terbalik kasus korupsi. "Jadi diperoleh dari mana misalnya, gaji, dividen, hadiah, honor, dan sebagainya adalah untuk disesuaikan besar tarifnya dalam menghitung pajak," tegasnya.

Pada 2010, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak 8.202.309, dengan jumlah WP yang terdaftar sebanyak 15.911.576 dan wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 14.101.933 sehingga rasio kepatuhannya sebesar 58,16%.

Tahun ini, Ditjen Pajak menargetkan rasio penyampaian SPT sebesar 62,5% dengan wajib pajak yang terdaftar per Januari 2011 sebanyak

18.116.000 wajib pajak atau naik 30% dari tahun lalu.

Batas akhir penyampaian SPT untuk wajib pajak perorangan adalah 31 Maret 2011 dan 30 April 2011 untuk wajib pajak badan. Bila terlambat, akan dikenai sanksi membayar denda Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Beberapa waktu lalu, pemasukan negara dari pajak diperkirakan dapat naik 34,2% per tahun, jauh di atas rata-rata pertumbuhan penerimaan dari pos itu selama 5 tahun terakhir, jika pemerintah berhasil mengatasi mafia di sistem perpajakan.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyebutkan rata-rata pertumbuhan penerimaan negara selama 5 tahun terakhir, serta target peningkatan pemasukan dari pajak pada 2011 hanya 17,7%.

Padahal, menurutnya, angka itu bisa menyentuh 34,2% per tahun, seperti yang pernah dicapai pada 2008. Dalam APBN 2011, pajak diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau sebesar 76% dari total target penerimaan negara yang ditetapkan sebesar Rp1.105 triliun.

Partisipasi pembayar pajak masih rendah

OLEH AHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Tingkat partisipasi pembayaran pajak di Indonesia dinilai masih sangat rendah karena sebagian besar kontribusi setoran pajak berasal dari sebagian kecil dari populasi di Tanah Air.

Pengamat pajak dari Fisip UI Ruston Tambunan mengatakan perhitungan pajak per kapita tidak menggambarkan realitas komposisi penerimaan pajak yang selama ini masih didominasi oleh wajib pajak kaya.

"Hitung-hitungan [pajak per kapita] secara global memang begitu tetapi itu tidak berarti menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak," katanya kepada *Bisnis* di Jakarta, kemarin.

Pernyataan Ruston itu merupakan tanggapan atas klaim perbaikan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang dilontarkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Otoritas pajak itu menggunakan angka *tax per capita* pada tahun lalu sebesar Rp2.485.614 sebagai patokan perbaikan kepatuhan tersebut.

Nilai pajak per kapita dihitung dari jumlah pajak yang bisa dipungut oleh Ditjen Pajak dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia.

Ruston mengatakan dalam perhitungan nilai pajak per kapita seharusnya variabel yang digunakan harus memperhatikan

jumlah penduduk yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan nilai penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

"Kan tidak semua penduduk menjadi wajib pajak. Apalagi kontribusi terbesar wajib pajak orang pribadi paling juga berasal dari persentase kecil dari penduduk," jelasnya.

Bukan acuan

Dia mengatakan perhitungan nilai pajak per kapita belum bisa dijadikan acuan dalam menggambarkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak.

Kepala Subdit Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Ditjen Pajak Liberty Pandiangan menerangkan apabila realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp590,47 triliun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta, nilai pajak per kapita pada tahun lalu mencapai Rp2.485.614 atau sekitar 10% dari pendapatan per kapita.

"Ukuran ini untuk negara berkembang termasuk bagus karena bagaimanapun sebagai masyarakat harus melakukan kegiatan lain untuk pengeluarannya dari pendapatan yang diterima [selain bayar pajak]," kata Liberty pada akhir pekan lalu.

Dia menuturkan pada tahun ini, dengan asumsi pertumbuhan penduduk 2% maka nilai pajak per kapita diperkirakan mencapai Rp2.925.756.